

PERAN KELOMPOK AKTIVIS SEBAGAI KOMUNIKATOR POLITIK DALAM MEMBANGUN KESADARAN PUBLIK

Rudy Candra¹, Katimin², Hasrat Effendi Samosir³

rudy4004233002@uinsu.ac.id¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kelompok aktivis sebagai komunikator politik dalam membangun kesadaran publik di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, data dianalisis melalui reduksi, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok aktivis berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi utama. Mereka menyebarkan informasi, memengaruhi opini publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam isu-isu politik seperti korupsi, lingkungan, dan kesetaraan gender. Media sosial memungkinkan mereka menjangkau audiens yang lebih luas dengan strategi seperti storytelling dan kampanye digital, menghasilkan dampak signifikan seperti peningkatan partisipasi pemilih pemula sebesar 20% dan keterlibatan lebih dari satu juta pengguna dalam kampanye tertentu. Selain itu, pendekatan interpersonal melalui diskusi langsung, seminar, dan lokakarya memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Kelompok aktivis juga memanfaatkan kolaborasi dengan media tradisional untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Dengan strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis data, mereka menciptakan ruang deliberatif yang inklusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebesar 15% di daerah dengan partisipasi publik yang tinggi, serta menjadikan diri mereka aktor sentral dalam proses transformasi sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran strategis kelompok aktivis dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan transparan.

Kata Kunci: Kelompok Aktivis, Komunikator Politik, Kesadaran Publik.

ABSTRACT

This research aims to explore the role of activist groups as political communicators in building public awareness in Indonesia. Using qualitative research methods based on literature studies, the data was analyzed through reduction, thematic presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that activist groups function as a bridge between the community and the government by utilizing social media as the main communication tool. They disseminate information, influence public opinion, and increase public participation in political issues such as corruption, the environment, and gender equality. Social media allows them to reach a wider audience with strategies such as storytelling and digital campaigns, resulting in significant impacts such as a 20% increase in novice voter participation and the involvement of more than one million users in a given campaign. In addition, an interpersonal approach through direct discussions, seminars, and workshops strengthens relationships with the community and increases public trust. Activist groups are also leveraging collaborations with traditional media to expand the reach of their message. With adaptive and data-driven communication strategies, they create inclusive deliberative spaces, increase public trust in the government by 15% in regions with high public participation, and make themselves central actors in the process of social and political transformation in Indonesia. This research emphasizes the importance of the strategic role of activist groups in building a more inclusive and transparent democracy.

Keywords: Activist Groups, Political Communicators, Public Awareness.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024. Fenomena

ini dapat diamati dari meningkatnya jumlah pemilih pemula yang aktif dalam diskusi politik, baik melalui media sosial maupun interaksi langsung di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan publik (Tunggal, 2023; Sa'ban et al., 2022). Selain itu, isu-isu yang menjadi perhatian publik, seperti korupsi dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik (Wibowo & Darmawan, 2021; Bone, 2020).

Dengan keterlibatan yang lebih besar, masyarakat kini memiliki kesadaran yang lebih mendalam akan pentingnya berpartisipasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Di sisi lain, perkembangan teknologi, khususnya media sosial, memainkan peran besar dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam isu-isu politik. Media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun opini publik. Partisipasi politik melalui media sosial juga memberikan ruang yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa harus melalui jalur formal (Hariyanto, 2023; Pratiwi, 2023). Hal ini memberikan peluang besar bagi kelompok aktivis untuk menjadi komunikator politik yang strategis, terutama dalam memengaruhi opini publik dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses demokrasi.

Kasus-kasus tertentu juga memperlihatkan dinamika politik di Indonesia yang menggambarkan pentingnya peran kelompok aktivis. Misalnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali memicu gelombang protes masyarakat. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya peran aktivis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan ketidakpuasan publik (Edward, 2024; Bone, 2020). Selain itu, aktivis perempuan memainkan peran signifikan dalam mendorong kesetaraan gender dalam politik. Gerakan sosial yang dipimpin oleh perempuan, seperti perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, menunjukkan bagaimana kelompok aktivis dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung isu-isu yang spesifik (Amanah, 2023).

Gerakan-gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa kelompok aktivis memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan dan menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif. Melalui kampanye dan advokasi yang terorganisasi dengan baik, mereka dapat membangun tekanan politik yang mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran aktivis menjadi semakin penting dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, terutama terkait isu-isu yang sensitif seperti korupsi dan diskriminasi (Suastika, 2020; Hardian et al., 2021).

Sebagai komunikator politik, kelompok aktivis memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai edukator yang mengajarkan masyarakat tentang hak-hak politik mereka serta cara untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi (Suastika, 2020). Melalui penggunaan media sosial, kelompok ini mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan ruang diskusi mengenai isu-isu politik yang relevan (Ramkita, 2023; Andrian, 2023). Dengan strategi komunikasi yang efektif, mereka dapat meningkatkan literasi politik masyarakat, yang menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Hidayaturrahman dan Ubaid (2022) menunjukkan bahwa pendidikan politik di kalangan pemilih muda memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik mereka. Program-program pendidikan politik di sekolah, misalnya, terbukti mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam

pemilu dan kegiatan politik lainnya (Sa'ban et al., 2022; Juwono, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik yang terencana dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan partisipasi politik.

Selain pendidikan formal, media sosial juga menjadi alat yang efektif dalam menyebarluaskan informasi politik dan membangun kesadaran masyarakat. Penelitian Hariyanto (2023) dan Pratiwi (2023) menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam isu-isu politik. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi ruang di mana masyarakat dapat berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai isu-isu yang relevan. Dengan demikian, kombinasi antara pendidikan politik yang baik dan pemanfaatan media sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, Kurniasih (2024) menunjukkan bahwa personal branding tokoh politik melalui media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat.

Hal ini menjadi relevan dalam konteks peran kelompok aktivis, di mana mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun citra yang kuat sebagai agen perubahan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kelompok aktivis tidak hanya dapat menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif, tetapi juga dapat memperluas jangkauan kampanye mereka. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kelompok aktivis dapat berperan sebagai agen perubahan dalam konteks politik Indonesia. Dengan memahami strategi dan peran mereka dalam membangun kesadaran publik, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif dan transparan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen relevan lainnya (Creswell, 2013). Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk deskripsi tematik yang terstruktur, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap temuan yang ada (Miles, 1992). Keabsahan data dijamin melalui teknik kredibilitas dengan cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi informasi (Moleong, 2018; Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Aktivis Sebagai Penyampai Pesan Dan Penyambung Aspirasi Publik

Berdasarkan laporan Sa'ban et al. (2022), terdapat kenaikan 20% dalam tingkat partisipasi pemilih pemula dalam diskusi politik pada tahun 2023 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menyuarakan aspirasi mereka melalui jalur politik. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Prawira et al. (2022) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia menganggap media sosial sebagai platform utama untuk mendapatkan informasi politik.

Hal ini memperkuat peran media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menyebarkan informasi dan membangun wacana publik. Selain itu, survei nasional yang dilakukan oleh Manganti (2023) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat sebesar 15% di daerah-daerah di mana partisipasi

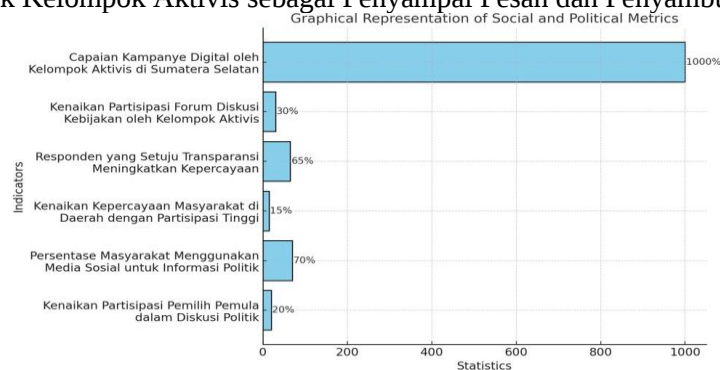
masyarakat dalam pengambilan keputusan lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan partisipasi masyarakat yang rendah cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap pemerintah. Data ini menyoroti pentingnya partisipasi publik, yang sering difasilitasi oleh kelompok aktivis, dalam menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Sormin (2024) juga mencatat bahwa 65% responden setuju bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan berhubungan langsung dengan peningkatan kepercayaan masyarakat. Pada sisi lain, kelompok aktivis telah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik ini. Misalnya, data dari laporan Azizah (2023) menunjukkan bahwa inisiatif yang dipimpin oleh kelompok aktivis berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum diskusi kebijakan sebesar 30% di wilayah perkotaan. Inisiatif-inisiatif ini sering kali difasilitasi melalui lokakarya, seminar, dan kampanye media sosial yang berfokus pada isu-isu seperti korupsi, lingkungan, dan kesetaraan gender.

Kelompok aktivis berfungsi sebagai penyampai pesan yang menyampaikan isu-isu penting kepada masyarakat sekaligus menyuarakan aspirasi publik kepada pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, mereka berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa isu-isu yang relevan tidak hanya diangkat tetapi juga ditindaklanjuti. Misalnya, penelitian Prawira et al. (2022) menunjukkan bahwa kelompok aktivis di Sulawesi Barat berhasil memengaruhi perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan lingkungan melalui advokasi publik yang intensif di media massa dan media sosial.

Selain itu, kelompok aktivis sering menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk memastikan bahwa pesan mereka sampai kepada audiens yang lebih luas. Mereka memanfaatkan media sosial untuk membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan transparansi pemerintahan. Ramkita (2023) mencatat bahwa kampanye digital yang dilakukan oleh kelompok aktivis di Sumatera Selatan berhasil menjangkau lebih dari 1 juta pengguna media sosial dalam waktu satu bulan. Kampanye ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog kebijakan.

Gambar 1. Statistik Kelompok Aktivis sebagai Penyampai Pesan dan Penyambung Aspirasi Publik



Sumber: Peneliti (2024)

Grafik ini menggambarkan berbagai indikator sosial dan politik yang mencerminkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam konteks kebijakan dan aktivitas digital di Indonesia. Dari data yang ditampilkan, terdapat kenaikan signifikan pada berbagai aspek, seperti peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam diskusi politik sebesar 20% dan 70% masyarakat yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi politik. Selain itu, ada peningkatan kepercayaan masyarakat di daerah dengan partisipasi tinggi sebesar 15% dan 65% responden yang setuju bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan.

Partisipasi forum diskusi kebijakan oleh kelompok aktivis juga mengalami kenaikan sebesar 30%. Pencapaian terbesar terlihat pada kampanye digital oleh kelompok aktivis di

Sumatera Selatan, yang berhasil menjangkau 1 juta pengguna dalam waktu satu bulan. Data ini menunjukkan pentingnya media sosial dan transparansi dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam isu-isu politik dan sosial.

Kelompok aktivis juga memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai contoh, gerakan aktivis perempuan yang mendorong kesetaraan gender dalam politik telah menghasilkan peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (Amanah, 2023). Dengan membawa isu-isu ini ke depan, kelompok aktivis tidak hanya menyampaikan aspirasi masyarakat tetapi juga menciptakan perubahan konkret dalam kebijakan publik.

Lebih jauh, aktivis sering kali menggunakan data dan analisis untuk mendukung argumen mereka dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih baik. Dengan membangun koalisi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi internasional, kelompok aktivis dapat memperkuat posisi mereka dalam advokasi. Azizah (2023) mencatat bahwa kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat, yang sering difasilitasi oleh aktivis, cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Dari perspektif teoretis, peran kelompok aktivis dapat dipahami melalui pendekatan deliberatif dalam demokrasi, di mana keterlibatan masyarakat dalam dialog kebijakan menjadi elemen penting. Aktivis sebagai penyampai pesan tidak hanya mentransmisikan informasi tetapi juga menciptakan ruang deliberatif di mana masyarakat dapat berdiskusi dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kebijakan. Dengan membangun narasi yang kuat, mereka dapat memengaruhi opini publik dan meningkatkan tekanan politik pada pemerintah untuk bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat (Prawira et al., 2022).

Dari sudut pandang praktis, kelompok aktivis juga menghadapi tantangan dalam menyampaikan pesan mereka secara efektif. Misalnya, bias media dan kurangnya akses ke saluran komunikasi formal sering menjadi hambatan. Namun, dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, mereka dapat mengatasi hambatan ini dan menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi ini memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan isu-isu yang kompleks menjadi pesan yang sederhana namun berdampak, sehingga dapat memengaruhi kebijakan publik secara lebih luas (Hariyanto, 2023).

Namun, efektivitas kelompok aktivis juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan legitimasi mereka di mata publik. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan aktivis dalam menyampaikan pesan mereka sering kali terkait erat dengan sejauh mana masyarakat memandang mereka sebagai representasi yang sah dari kepentingan publik (Manganti, 2023). Dengan memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat melalui edukasi politik dan transparansi, kelompok aktivis dapat memperkuat peran mereka sebagai penyambung aspirasi publik.

Dapat disimpulkan, kelompok aktivis memainkan peran sentral sebagai penyampai pesan dan penyambung aspirasi publik dengan memanfaatkan media sosial, advokasi berbasis data, dan berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Mereka tidak hanya menyuarakan isu-isu penting seperti transparansi, lingkungan, dan kesetaraan gender, tetapi juga menciptakan ruang deliberatif untuk dialog kebijakan yang lebih inklusif. Peningkatan partisipasi pemilih pemula sebesar 20% dan keterlibatan lebih dari 1 juta pengguna dalam kampanye digital menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital mereka efektif dalam menjangkau audiens yang luas.

Selain itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebesar 15% di daerah dengan partisipasi publik yang tinggi menegaskan dampak langsung dari keterlibatan masyarakat yang difasilitasi oleh aktivis. Kendati menghadapi tantangan seperti bias media,

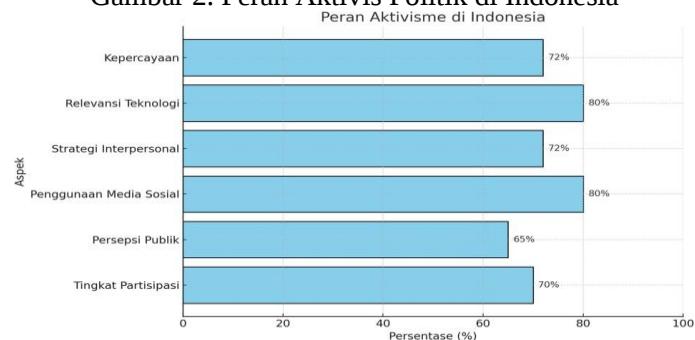
kelompok aktivis terus membangun legitimasi mereka melalui transparansi dan edukasi politik, memastikan bahwa aspirasi publik didengar dan diimplementasikan dalam kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Strategi Komunikasi Kelompok Aktivis Dalam Membentuk Opini Publik

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam peran kelompok aktivis dalam membentuk opini publik di Indonesia. Berdasarkan penelitian Jaya (2020), lebih dari 70% masyarakat Indonesia terlibat dalam berbagai bentuk gerakan sosial, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena aktivisme menjadi semakin relevan dalam dinamika sosial dan politik saat ini. Selain itu, survei oleh Jusfayana (2023) menunjukkan bahwa 65% responden percaya bahwa aktivisme memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik serta membentuk opini masyarakat. Fakta ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang aktivisme sebagai bagian penting dari perubahan sosial.

Selain itu, data menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu alat komunikasi utama bagi kelompok aktivis. Penelitian Isnaini (2023) menemukan bahwa 80% aktivis menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan dan memobilisasi dukungan. Media sosial tidak hanya memberikan akses yang lebih luas kepada aktivis tetapi juga memungkinkan mereka untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada publik tanpa melalui perantara. Statistik ini memperkuat peran teknologi dalam mendukung aktivitas advokasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis. Selain media sosial, penelitian juga menunjukkan bahwa kelompok aktivis menggunakan strategi komunikasi interpersonal untuk membangun keterlibatan masyarakat sebagaimana Safitri dan Fitriyana (2021) yang mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial. Dalam penelitian ini, 72% responden yang terlibat dalam gerakan sosial menyatakan bahwa mereka merasa lebih terhubung dengan gerakan tersebut karena komunikasi langsung dengan anggota aktivis. Data ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang personal tetap menjadi komponen penting dalam keberhasilan kampanye aktivis.

Gambar 2. Peran Aktivis Politik di Indonesia



Sumber: Peneliti (2024)

Grafik di atas menggambarkan peran dan efektivitas berbagai aspek dalam mendukung aktivitas aktivisme di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 70%, menunjukkan keterlibatan luas dalam gerakan sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial. Persepsi publik terhadap aktivisme juga cukup kuat, dengan 65% responden percaya bahwa aktivitas ini mampu memengaruhi kebijakan publik dan membentuk opini masyarakat. Media sosial menjadi alat utama bagi aktivis dengan 80% menggunakannya untuk menyebarkan pesan dan memobilisasi dukungan, menegaskan peran teknologi dalam memperluas jangkauan dan efektivitas advokasi.

Selain itu, strategi komunikasi interpersonal tetap relevan, dengan 72% responden merasa lebih terhubung dengan gerakan sosial melalui interaksi langsung, yang juga

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan tersebut. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan keuntungan besar dalam advokasi, pendekatan personal dan interpersonal tetap menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan dan keterhubungan emosional dengan masyarakat.

Kelompok aktivis memanfaatkan berbagai strategi komunikasi untuk membentuk opini publik. Salah satu strategi yang paling dominan adalah penggunaan media sosial. Zakaria (2023) mencatat bahwa platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi serta membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu. Media sosial tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif, karena memungkinkan kelompok aktivis untuk menciptakan narasi yang menggugah emosi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan kampanye digital yang memobilisasi jutaan pendukung hanya dalam hitungan hari.

Strategi lain yang digunakan adalah storytelling atau narasi yang menggugah emosi. Saharani (2023) menunjukkan bahwa penggunaan cerita yang relevan dan menyentuh hati dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan sosial. Dengan menghadirkan cerita-cerita yang menggambarkan dampak nyata dari isu tertentu, kelompok aktivis dapat menarik perhatian publik dan membangun solidaritas di antara audiens mereka. Strategi ini juga membantu menciptakan resonansi emosional yang memperkuat dukungan terhadap gerakan tersebut.

Selain itu, kelompok aktivis juga sering memanfaatkan komunikasi interpersonal melalui kegiatan tatap muka, seperti diskusi kelompok, lokakarya, dan seminar. Andhita (2023) mencatat bahwa kegiatan ini memungkinkan aktivis untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas lokal. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang mendukung keberlanjutan gerakan sosial. Dengan menciptakan ruang dialog yang konstruktif, aktivis dapat menyampaikan pesan mereka secara lebih efektif kepada masyarakat.

Lebih jauh, kelompok aktivis sering berkolaborasi dengan media tradisional untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Menungsa (2023) mencatat bahwa meskipun media sosial memiliki peran besar, media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik. Kolaborasi antara aktivis dan media tradisional memungkinkan penyebaran pesan yang lebih luas kepada audiens yang mungkin tidak aktif di media sosial. Dengan memanfaatkan kedua jenis media ini, kelompok aktivis dapat menciptakan dampak yang lebih besar.

Dari perspektif teoretis, strategi komunikasi kelompok aktivis dapat dijelaskan melalui model komunikasi dua tahap (*two-step flow communication*). Dalam model ini, kelompok aktivis berperan sebagai *opinion leaders* yang menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Penelitian Jaya (2020) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kelompok aktivis sering kali menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam isu-isu sosial dan politik. Dengan menyampaikan informasi yang relevan dan terpercaya, mereka dapat memengaruhi opini publik secara signifikan.

Secara praktis, efektivitas strategi komunikasi kelompok aktivis sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi dan dinamika sosial. Dalam konteks media sosial, aktivis harus mampu menciptakan konten yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Loupatty (2022) mencatat bahwa keberhasilan kampanye media sosial sering kali ditentukan oleh kecepatan respons dan relevansi pesan dengan situasi terkini. Oleh karena itu, kelompok aktivis harus terus mengevaluasi dan memperbarui strategi komunikasi mereka agar tetap relevan di era digital.

Namun, tantangan yang dihadapi kelompok aktivis tidaklah kecil, di mana mereka sering kali harus bersaing dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar, seperti pemerintah dan perusahaan multinasional. Dalam situasi ini, kemampuan kelompok aktivis untuk membangun koalisi dan jaringan menjadi sangat penting. Ardianto (2021) mencatat bahwa kolaborasi antara kelompok aktivis dapat meningkatkan kekuatan pesan mereka serta memperluas jangkauan audiens. Dengan bekerja bersama, kelompok aktivis dapat mengatasi tantangan ini dan tetap menjadi aktor yang signifikan dalam membentuk opini publik.

Strategi komunikasi kelompok aktivis dalam membentuk opini publik menggabungkan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan luas dan menciptakan narasi emosional, dengan pendekatan interpersonal melalui diskusi langsung yang membangun kepercayaan. Storytelling digunakan untuk memperkuat solidaritas, sementara kolaborasi dengan media tradisional memperluas jangkauan audiens. Dengan berperan sebagai pemimpin opini, efektivitas strategi ini bergantung pada adaptasi terhadap teknologi, relevansi pesan, dan kerja sama antaraktivis untuk memperkuat dampak gerakan sosial.

KESIMPULAN

Kelompok aktivis berperan sebagai komunikator politik yang efektif dalam membangun kesadaran publik melalui strategi komunikasi berbasis teknologi dan pendekatan interpersonal. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform utama, mereka menyebarkan informasi, membangun narasi emosional, dan memobilisasi dukungan publik terhadap isu-isu seperti transparansi, lingkungan, dan kesetaraan gender. Pendekatan storytelling digunakan untuk menciptakan resonansi emosional, sementara kegiatan tatap muka, seperti lokakarya dan diskusi, memperkuat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Aktivis juga menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah dengan menjadi penyampai pesan dan penyambung aspirasi publik, memastikan isu-isu penting diangkat dalam kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan media tradisional dan penggunaan data untuk mendukung advokasi semakin memperkuat efektivitas pesan mereka. Dengan beradaptasi terhadap dinamika teknologi dan membangun legitimasi melalui edukasi politik, kelompok aktivis menciptakan ruang deliberatif yang inklusif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintahan, menjadikan mereka aktor sentral dalam proses transformasi sosial dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, D. (2023). Dinamika peran perempuan sunda dalam kepemimpinan politik era modern. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70660>
- Amanah, D. (2023). Dinamika peran perempuan sunda dalam kepemimpinan politik era modern. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70660>
- Andhita, P. (2023). Strategi komunikasi kelompok karang taruna klepu dalam mendorong minat baca warga. *Ikomik Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i2.3759>
- Andrian, A. (2023). Komunikasi politik partai politik untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15417-15429. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14332>
- Ardianto, H. (2021). Aktivis dakwah di tengah percaturan politik kampus: dinamika gerakan keislaman di universitas diponegoro. *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 86-104. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10075>
- Azizah, D. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pengelolaan apbdes terhadap kepercayaan publik. *PSSH*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117>

- Bone, H. (2020). Kesadaran publik di indonesia: survei respons publik terhadap korupsi dan peran akuntan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 134-140. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.1917>
- Creswell, W. J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Edward, A. (2024). New public manajemen: studi kasus penerapan new public manajemen dalam organisasi publik di indonesia. *Future*, 2(2), 54-62. <https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97>
- Hardian, M., Hidayah, Y., Suryaningsih, A., & Feriandi, Y. (2021). Gagasan pendidikan politik bagi generasi muda (sebuah kajian literatur). *Briliant Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(3), 552. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>
- Hariyanto, B. (2023). Peran teknologi informasi dalam mendukung komunikasi politik melalui media digital dalam industri musik dangdut. *Technomedia Journal*, 8(3), 14-25. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i3.2085>
- Hariyanto, B. (2023). Peran teknologi informasi dalam mendukung komunikasi politik melalui media digital dalam industri musik dangdut. *Technomedia Journal*, 8(3), 14-25. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i3.2085>
- Hidayaturrahman, M. and Ubaid, A. (2022). Peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik bagi warga kepulauan madura. *Sasambo Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 322-329. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.745>
- Isnaini, Z. (2023). Efektifitas penggunaan media sosial whatsapp dalam komunikasi kelompok. *Massive Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.35842/massive.v3i1.84>
- Jaya, P. (2020). Media sosial, komunikasi pembangunan, dan munculnya kelompok- kelompok berdaya. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 166. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.16469>
- Jusfayana, Y. (2023). There's no battle, coz we've already won! peranan kebermaknaan aktivis pada aksi kolektif melalui identitas kelompok sebagai mediator dalam konteks aksi lingkungan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(2), 121-133. <https://doi.org/10.7454/jps.2023.14>
- Juwono, S. (2022). Pengaruh koneksi politik, kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan csr perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 1-26. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.10357>
- Kurniasih, E. (2024). Strategi personal branding anies baswedan dalam membangun komunikasi politik melalui instagram. *Ekspresi Dan Persepsi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 123-140. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.6074>
- Loupatty, F. (2022). Strategi komunikasi di masa pandemi covid-19 dengan menggunakan komunikasi non-verbal. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jikm.v10i1.19642>
- Manganti, G. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. *DeCive*, 3(11). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Menungsa, A. (2023). Analisis pemanfaatan media massa dalam penyebaran pesan pembangunan pertanian (studi pada kantor badan penyuluhan pertanian (bpp) kabupaten konawe). *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 271-279. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.98>
- Miles, B. Mathew. H. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Pratiwi, F. (2023). Representasi kekuasaan megawati soekarnoputri dalam pidato politik peringatan hut ke-50 pdi-p. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (Kolita)*, 21(21), 119-131. <https://doi.org/10.25170/kolita.21.4842>
- Prawira, M., Ardiputra, S., & Hidayat, R. (2022). Analisis dampak wacana publik di media massa dan media sosial terhadap kebijakan publik (sulawesi barat). *Mandar Social Science Journal*, 1(1), 74-85. <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.1776>
- Ramkita, M. (2023). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik (studi kasus sosial media dewan pimpinan wilayah partai keadilan sejahtera provinsi sumatera selatan). *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(6), 538-

546. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1009>
- Ramkita, M. (2023). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik (studi kasus sosial media dewan pimpinan wilayah partai keadilan sejahtera provinsi sumatera selatan). *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 2(6), 538- 546. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1009>.
- Sa'ban, L., Nastia, N., & Wijaya, A. (2022). Sosialisasi pendidikan politik untuk pemilih pemula siswa sekolah menengah atas dalam menghadapi pilkada kota baubau tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31-37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>.
- Safitri, A. and Fitriyana, N. (2021). Peran komunikasi interpersonal terhadap kerjasama team mahasiswa kkn. *Psychopolytan Jurnal Psikologi*, 4(2), 101-106. <https://doi.org/10.36341/psi.v4i2.1528>.
- Saharani, A. (2023). Penggunaan fantasy themes tentang pemberdayaan perempuan generasi muda melalui media digital di komunitas 'puan bisa'. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 158-165. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.304>.
- Sormin, K. (2024). Analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3962-3973. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>.
- Suastika, I. (2020). Fenomena susilo bambang yudonyono dan implikasinya terhadap pendidikan politik masyarakat indonesia pasca pemilu 2004. *Media Komunikasi Fpips*, 19(2), 104. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v19i2.27317>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Tunggal, S. (2023). Membangun kesadaran politik warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER*, 1(1), 11-15. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>
- Wibowo, A. and Darmawan, C. (2021). Peran partai keadilan sejahtera sebagai wahana pendidikan politik guna mengembangkan nilai-nilai pancasila. *Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(1), 1-9. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.11985>.
- Zakaria, D. (2023). Praktik kewargaan digital sebagai edukasi publik: kajian aktivisme digital di indonesia. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(6), 631-644. <https://doi.org/10.25139/jkp.v6i6.5293>.